

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Pada Desember 2025 terjadi inflasi year on year (y-on-y) Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 3,01 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 110,26. Inflasi tertinggi terjadi di Kota Mataram sebesar 3,21 persen dengan IHK sebesar 110,44 dan inflasi terendah terjadi di Kabupaten Sumbawa sebesar 2,78 persen dengan IHK sebesar 109,98.

Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sembilan indeks kelompok pengeluaran dari total sebelas indeks kelompok, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 3,83 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,84 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,89 persen; kelompok kesehatan sebesar 1,75 persen; kelompok transportasi sebesar 0,68 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,99 persen; kelompok pendidikan sebesar 2,79 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 1,63 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 17,76 persen. Sedangkan penurunan indeks kelompok pengeluaran terjadi pada kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,58 persen dan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,34 persen.

Tingkat inflasi month to month (m-to-m) dan tingkat inflasi year to date (y-to-d) Provinsi Nusa Tenggara Barat bulan Desember 2025 masing-masing sebesar 0,72 persen dan 3,01 persen.

Berdasarkan press release BPS pada tanggal 5 Januari 2026, inflasi nasional untuk inflasi bulan ke bulan (*Desember 2025 terhadap November 2025*) berada pada angka 0,64%. Sedangkan untuk inflasi Nasional tahun ke tahun (*Desember 2025 terhadap Desember 2024*) berada pada angka 2,92%. Untuk inflasi bulan ke bulan (*Desember 2025 terhadap November 2025*) Provinsi NTB berada pada angka 0,72%. Sedangkan untuk inflasi Provinsi NTB tahun ke tahun (*Desember 2025 terhadap Desember 2024*) Provinsi NTB berada pada angka 3,01%. Inflasi bulan ke bulan untuk Kota Mataram sebesar 0,71%. Sedangkan Inflasi tahun ke tahun sebesar 3,21%. Untuk Kabupaten Lombok Barat angka inflasi mengacu pada Kota Mataram.

Andil beberapa komoditas terhadap inflasi/deflasi Desember 2025 (m-to-m) pada Kota Mataram (Kabupaten Lombok Barat mengacu pada Kota Mataram) untuk inflasi : Cabai Rawit, Bawang merah, emas perhiasan, Daging ayam ras, tomat. Sedangkan untuk komoditas penyumbang deflasi Desember 2025 diantaranya cabai merah, jeruk nipis/limau, angkutan Sungai, danau dan penyebrangan, wortel, salak.

DAFTAR HARGA KEBUTUHAN POKOK STRATEGIS BERDASARKAN DATA SP2KP BULAN OKTOBER, NOVEMBER, DAN DESEMBER 2025 PADA KAB. LOMBOK BARAT

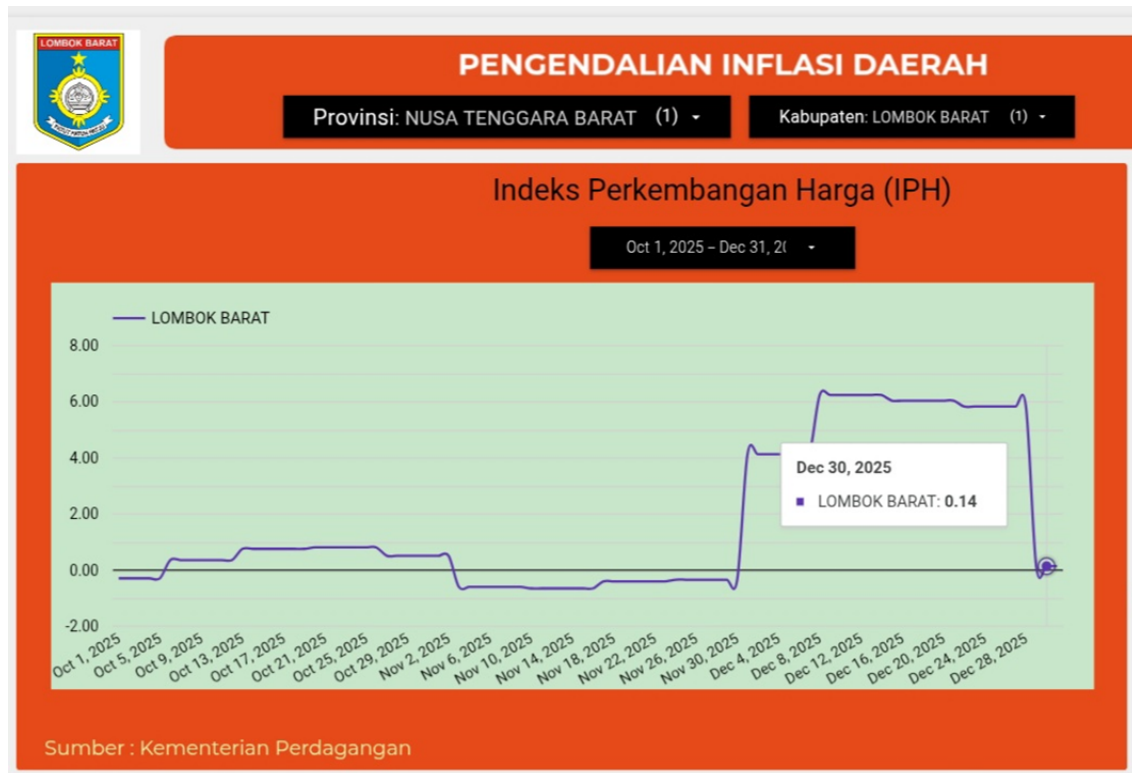
NO	JENIS BARANG	SATUAN	BULAN			KETERANGAN
			OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	Beras Cap IR (Medium)	Kg	13.500	13.500	13.500	Stabil
2	Beras Cap Mataram (Premium)	Kg	14.978	14.500	14.500	Stabil
3	Beras Cap Padiku (Premium)	Kg	14.978	14.500	14.500	Stabil

4	Beras SPHP Bulog	Kg	12.000	12.000	12.000	Stabil
5	Kedelai Lokal,1 kg	Kg	15.000	15.000	15.000	Stabil
6	Kedelai Impor,1 kg	Kg	14.000	14.000	14.000	Stabil
7	Cabai Merah Keriting,1 kg	Kg	44.130	41.200	46.381	Stabil
8	Cabai Merah Besar,1 kg	Kg	41.000	38.900	32.619	Stabil
9	Cabai Rawit Merah,1 kg	Kg	22.304	24.950	63.000	Tidak Stabil
10	Cabai Rawit Hijau,1 kg	Kg	12.565	13.050	23.714	Tidak Stabil
11	Bawang Merah,1 kg	Kg	35.348	38.200	50.714	Tidak Stabil
12	Gula Pasir Curah, 1kg	Kg	17.000	17.000	17.000	Stabil
13	Gula Pasir Kemasan, 1kg	Kg	18.000	18.000	18.000	Stabil
14	Minyak Goreng Curah,1 lt	Kg	19.000	19.000	19.000	Stabil
15	Minyak Goreng Kemasan Premium,1 lt	Kg	20.348	20.500	20.500	Stabil
16	Minyakita,1 lt	Kg	15.700	15.700	15.700	Stabil
17	Tepung Terigu,1 kg	Kg	13.000	13.000	13.000	Stabil
18	Daging Ayam Ras Karkas,1 kg	Kg	38.957	37.500	40.000	Stabil
19	Telur Ayam Ras,1 kg	Kg	29.500	29.500	29.500	Stabil
20	Daging Sapi Paha Belakang,1 kg	Kg	128.478	130.000	130.000	Stabil
21	Daging Sapi Tetelan,1 kg	Kg	60.000	60.000	69.524	Stabil
22	Ikan Bandeng,1 kg	Kg	40.000	38.750	40.000	Stabil
23	Ikan Tongkol,1 kg	Kg	25.391	25.000	25.476	Stabil
24	Ikan Teri,1 kg	Kg	80.000	80.000	80.000	Stabil

25	Bawang Putih Honan,1 kg	Kg	34.000	30.000	30.476	Stabil
26	Bawang Putih Kating,1 kg	Kg	39.000	39.000	39.000	Stabil
27	Garam Halus,1 kg	Kg	10.000	10.000	10.000	Stabil
28	Susu Kental Manis, 370 gr	Kg	12.000	12.000	12.000	Stabil
29	Susu Bubuk (Setara Dancow),400 gr	Kg	42.000	42.000	42.000	Stabil
30	Udang Basah,1 kg	Kg	60.000	60.000	60.000	Stabil
31	Tomat,1 kg	Kg	3.000	6.400	10.619	Tidak Stabil
32	Kentang Sedang,1 kg	Kg	18.000	18.000	18.000	Stabil
33	Sawi Hijau,1 kg	Kg	8.000	8.000	8.000	Stabil
34	Kangkung,1 kg	Kg	5.043	5.000	5.000	Stabil
35	Ketimun Sedang,1 kg	Kg	6.000	6.000	6.000	Stabil
36	Kacang Panjang,1 kg	Kg	8.000	8.000	8.000	Stabil
37	Ayam Kampung Utuh,1 ekor	Kg	65.000	65.000	65.000	Stabil
38	Telur Ayam Kampung,1 kg	Kg	54.000	54.000	54.000	Stabil

Sumber Data Disperindag Kab. Lombok Barat

**GRAFIK INDEKS PERKEMBANGAN HARGA (IPH) KAB. LOMBOK BARAT TANGGAL
1 OKTOBER S/D 31 DESEMBER 2025**



- Indeks Perkembangan Harga (IPH) yang terjadi pada M4 November berada pada angka -0,34% mengalami kenaikan menjadi 4,13% pada M1 Desember kemudian mengalami kenaikan kembali pada M2 Desember sebesar 6,24% yang disebabkan antara lain :
 - Harga cabai rawit dan bawang merah terus melonjak akibat musim hujan yang mengganggu produksi dan menurunkan pasokan di pasar. Perlu memperkuat koordinasi dengan petani, distributor, dan pedagang untuk memastikan ketersediaan komoditas serta memonitor perkembangan harga secara lebih intensif. Langkah cepat seperti operasi pasar, fasilitasi distribusi, dan dukungan perlindungan tanaman saat cuaca ekstrem dapat membantu meredam kenaikan harga.
 - Walaupun harga cabai merah mengalami penurunan dibanding bulan sebelumnya, komoditas ini tetap perlu mendapatkan perhatian karena memiliki potensi kembali mengalami kenaikan, terutama jika terjadi gangguan pasokan atau kondisi cuaca yang tidak menentu
 - Berdasarkan simulasi perhitungan melalui data IPH (month to month) didapatkan simulasi hasil YoY IPH Kabupaten Lombok Barat pada Bulan November **sesuai target nasional (4,78%)**. Hal ini menunjukkan perlu **pengendalian Inflasi yang masih dalam tahap aman**. Apabila IPH pada **akhir Desember** maksimal inflasi **1,5** maka IPH YoY Lombok Barat dalam rentang aman (on the track) mengikuti target Nasional pada akhir tahun
 - Berdasarkan kesepakatan pemerintah melalui TPIP ditetapkan sebagai berikut:
 - Target Inflasi Nasional Tahun 2025 Desember YoY sebesar +2,5% atau 1,5% - 3,5% untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Inflasi komoditas bergejolak (Volatile Food) disepakati dalam interval 3% - 5% untuk Inflasi YoY Desember 2025.
- Indeks Perkembangan Harga (IPH) yang terjadi pada M3 Desember berada pada angka 6,04% mengalami penurunan menjadi -0,14% pada M4 Desember yang disebabkan antara lain:
 - Berdasarkan simulasi perhitungan melalui data IPH (month to month) didapatkan

simulasi hasil YoY IPH Kabupaten Lombok Barat pada akhir 2025 setidaknya sesuai target nasional (9%). Hal ini menunjukkan perlu pengendalian Inflasi yang intensif di akhir tahun (NATARU) maka IPH YoY Lombok Barat dalam rentang aman (on the track) mengikuti target Nasional pada akhir tahun

Berdasarkan hasil pantauan Dinas Perindustrian dan Perdagangan pada Triwulan IV tahun 2025 (Oktober-Desember), Pada Triwulan IV tahun 2025 (Oktober-Desember), perkembangan harga barang kebutuhan pokok di Pasar Gerung dan Pasar Kediri menunjukkan dinamika yang bervariasi, dipengaruhi oleh faktor musiman, distribusi barang, serta tingkat permintaan masyarakat. Secara umum, harga beberapa komoditas mengalami fluktuasi harga, namun secara keseluruhan tetap dalam kondisi terkendali terkecuali komoditas cabe yang fluktuasinya sangat tinggi di triwulan IV ini disebabkan kurangnya pasokan ke pasar karena perubahan musim tanam di tingkat petani. Selama periode ini terjadi kenaikan harga pada beberapa komoditi seperti cabe merah besar, cabe rawit, cabe hijau, tomat dan bawang merah.

Dari sisi lain komoditas beras, gula pasir, dan minyak goreng kemasan, ikan segar dan sayur-mayur relatif stabil selama triwulan ini, Stabilitas ini tercapai berkat adanya pengawasan distribusi serta dukungan pasokan dari kabupaten tetangga, harga telur ayam ras dan tepung terigu juga menunjukkan tren yang cenderung stabil, dengan fluktuasi harga dalam batas yang wajar. Secara umum, kondisi harga barang kebutuhan pokok di Pasar Gerung dan Pasar Kediri pada Triwulan IV masih tergolong terjaga dan stabil, meskipun terdapat beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga akibat faktor perayaan Natal dan Tahun baru, musiman tanam, dan distribusi, Dinas Perdagangan Kabupaten Lombok Barat akan terus melakukan pemantauan dan koordinasi dengan stakeholder terkait guna menjaga kestabilan harga dan ketersediaan barang di pasar.

Dinas Pertanian merupakan salah satu dinas teknis yang terkait dengan penurunan harga barang kebutuhan pokok bila terjadi inflasi, mengingat produk-produk hasil pertanian merupakan kebutuhan pokok seperti beras, cabe, bawang merah, tomat dll, yang setiap harinya dibutuhkan oleh masyarakat kita. Bila terjadi kenaikan harga-harga sembilan bahan pokok, sangat dirasakan oleh masyarakat kita, untuk itu peran dinas pertanian untuk membantu mengatasi inflasi sangat penting. Kegiatan pemantauan harga dilakukan sebagai upaya memonitor perkembangan harga yang ada, sehingga ketika harga beberapa bahan kebutuhan pokok naik, dapat dilakukan tindakan pengendalian harga barang tersebut dan upaya-upaya yang dilakukan. Di triwulan IV beberapa komoditi mengalami lonjakan harga yang cukup mengkhawatirkan masyarakat terutama beras, dan kelompok cabe-cabeian masih menjadi penyumbang inflasi di Kabupaten Lombok Barat walaupun masih dibawah angka inflasi Nasional. Adapun komoditi Beras pada triwulan IV ini harganya tetap, dengan rata rata harga Rp 14.000,- (Empat Belas Ribu Rupiah) sampai Rp 15.000,- (Lima Belas Ribu Rupiah). Di Kabupaten Lombok Barat setiap hari ada panen padi namun kondisi saat ini belum mampu menurunkan harga beras. Hal ini disebabkan oleh Harga GKP (Gabah Kering Panen) dari petani ke pengepul/pelaku usaha beras masih cukup tinggi dimana dari bulan April - Juni 2025 rata - rata GKP masih diangka Rp 7.200,- (Tujuh Ribu Dua Ratus Rupiah)/kg diatas HPP yang ditetapkan Pemerintah. Tingginya harga cabe disebabkan oleh gagalnya program bantuan Cabe ke masyarakat yang berkisar antara 95% disebabkan oleh Intensitas curah hujan yang tinggi serta hanyutnya tanaman cabai. dilahan sawah yang disebabkan oleh banjir. Walaupun harga cabe di pasar Tradisional Kabupaten Lombok Barat terbilang Tinggi Rp 60.000,- (Enam Puluh Ribu Rupiah) sampai Rp. 65.000,- (Enam Puluh Lima Ribu Rupiah) selama 3 bulan terakhir namun stock cabai di pasaran cukup tersedia. Tingginya harga cabai tidak terlalu

berpengaruh pada masyarakat karena Pemerintah Kabupaten Lombok Barat khususnya Pasar Tani/Tenten Tani Pertanian gencar melakukan pasar murah (OPM) ke desa-desa yang tidak menjadi sentra cabai dengan harga dibawah harga pasar/harga jual petani. Peranan Dinas pertanian dalam melakukan pemantauan harga komoditi pertanian sangat dibutuhkan untuk mengetahui ditingkat/dirantai pasar yang keberapa terjadinya kenaikan harga yg signifikan dan faktor penyebabnya apa saja, semua informasi pasar sangat dibutuhkan untuk menganalisis terjadinya fluktuasi harga.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

1. Pada bulan Oktober sampai dengan Desember ini komoditas cabe yang sering berfluktuasi harganya di sebabkan kurangnya hasil panen dari petani dan berubahnya musim tanam yang terjadi di petani.
2. Beberapa permasalahan yang dihadapi pada Dinas Pertanian dalam pengendalian harga terkait komoditas antara lain :
 - Bahwa pada musim panen padi saat ini (Oktober-Desember) rata rata GKP Petani dijual dengan harga 7.000 s/d 7.200/kg- diatas HPP, hal ini mempengaruhi tingginya harga beras berada di harga Rp 14.000 s/d 15.000,- dipasar tradisional
 - Tingginya harga cabai karena rendahnya produksi di bulan Desember karena adanya peralihan tanaman ke komoditi padi
 - Dukungan anggaran APBD untuk kegiatan pengembangan komoditi Bawang berkurang terkait budidaya, pasca panen serta dukungan SDM kepada pelaku utama dan pelaku usaha.
 - Kurangnya intensitas koordinasi dan komunikasi dengan stake holder terkait seperti pengepul, pengusaha dan aparat penegak hukum, ketika harga komoditi melambung tinggi, tindakan pemantauan dan pengawasan dilapangan ditingkatkan.
 - Kurangnya partisipasi petani untuk terjun langsung menjual produknya ke konsumen akhir/masyarakat.
 - Saat Harga rendah Pemerintah Daerah sudah ada kepedulian kepada petani dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Tentang Tenten Tani Keliling dimana salah satu pasalnya berbunyi petani bisa menjual produksinya langsung ke konsumen akhir dengan harga diatas harga pasar/sama dengan harga pasar ke ASN Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.
3. Pada sektor perikanan budidaya relatif stabil hal ini disebabkan terjaminnya ketersediaan ikan dan stabilnya harga dan pasokan pakan ikan. Kenaikan harga udang segar/udang basah disebabkan karena kenaikan harga di pihak distributor atau udang berasal dari wilayah luar Lombok (tambahan biaya transport). Kenaikan harga komoditas perikanan disebabkan karena berkurangnya ketersediaan ikan di pasar terutama jenis-jenis ikan hasil tangkapan seperti ikan tongkol dan ikan kembung. Berkurangnya ketersediaan disebabkan berkurangnya hasil tangkapan karena faktor musim dan kondisi cuaca.
4. Permasalahan utama pengendalian inflasi Daerah diantaranya:
 - a. Rendahnya konektivitas jaringan distribusi pangan, permasalahan daerah yang memiliki tingkat ketergantungan pasokan antar daerah yang cukup tinggi.

Kesenjangan informasi dan distorsi struktur pasar, kesenjangan informasi antar pelaku ditengah panjangnya rantai distribusi menyebabkan tidak efisiennya harga dipasar

- c. Produktivitas pangan yang berkurang / tidak optimal karena adanya kendala iklim yang tidak menentu khususnya di Kabupaten Lombok Barat.
 - d. Ketersediaan beberapa bahan pangan didaerah berkurang karena terjadinya pola tanam yang berubah sehingga memerlukan pasokan ketersediaanya berasal dari antar daerah
5. Inflasi dapat terjadi antara lain akibat konsumsi masyarakat yang meningkat dan ketidaklancaran distribusi barang. Peningkatan konsumsi masyarakat akan menyebabkan persediaan barang menurun dengan cepat. Karena permintaan terus naik, namun persediaan mengalami kendala sehingga tidak dapat mengimbangi permintaan konsumen, maka menimbulkan kenaikan harga. Di sisi lain, ketika distribusi barang tidak lancar, terjadi peningkatan harga karena kelangkaan barang di pasar sehingga tidak mampu memberi supply sesuai demand dari konsumen. Adapun peran Dinas Perhubungan adalah memastikan infrastruktur konektivitas maupun proses distribusi produk-produk kebutuhan masyarakat terjamin dengan baik. Pasokan yang cukup juga harus diikuti oleh kelancaran distribusi komoditas strategis. Kelancaran distribusi tersebut dipengaruhi oleh faktor moda angkutan dan sarana prasarana pendukung transportasi maupun fasilitas perlengkapan jalan.
3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

UPAYA PENGENDALIAN INFLASI DAERAH DI KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2025

1. KETERJANGKAUAN HARGA

- **MELAKUKAN OPERASI PASAR/GERAKAN PANGAN MURAH/PASAR TANI**
- Pemerintah Kabupaten Lombok Barat melaksanakan Operasi Pasar Murah (OPM)/Gerakan Pangan Murah (GPM) dan Pasar Tani bersinergi dengan Bank Indonesia (BI), Mitra BUMD, Bulog dan OPD terkait secara berkala.
- Untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pakan sebagai penyebab utama kenaikan harga ikan khususnya ikan budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat tetap melakukan pemantauan yang dilakukan oleh penyuluh perikanan di masing-masing wilayah. Selain itu untuk ketersediaan komoditas ikan pemantauan dilakukan di Cold Storage yang ada di Dusun Ireng Desa Jati Sela Kecamatan Gunung Sari dan sentra pemindangan di Kecamatan Batulayar.
- Untuk kegiatan survey harga pasar dilakukan setiap hari oleh Disperindag, Dikpangan dan Diperta Kab. Lobar pada Pasar Kediri dan Pasar Gerung. Melaporkan pergerakan harga komoditas rutin melalui aplikasi Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP) untuk memonitor Perkembangan Harga secara harian. Data atas laporan indeks perkembangan harga (IPH) yang digunakan sebagai laporan Ke Kemendagri adalah data yang diperoleh dari Disperindag Kab.Lobar yang kemudian akan di laporkan ke Itjen Kemendagri oleh Inspektorat. Data terkait indeks perkembangan harga (IPH) Kabupaten Lombok Barat dapat diakses melalui <http://s.bps.go.id/iphlobar>. Dan untuk update harga Kabupaten Lombok Barat dapat diakses melalui <http://s.bps.go.id/updatepasarlobar>. Selain itu dapat juga diakses melalui <https://silakniki.lombokbaratkab.go.id/>

b.

JADWAL PELAKSANAAN OPERASI PASAR MURAH (OPM), GERAKAN PANGAN MURAH (GPM) DAN TEN TEN TANI BULAN OKTOBER S/D DESEMBER 2025

NO	LOKASI	KECAMATAN	TANGGAL KEGIATAN	KETERANGAN
1	Kantor Desa Gapuk	Gerung	01 Oktober 2025	Tentakel
2	Halaman Kantor Dinas Pertanian	Labuapi	02 Oktober 2025	Tentakel
3	Kantor Desa Kediri	Kediri	03 Oktober 2025	Tentakel
4	Taman Kota Gerung	Gerung	05 Oktober 2025	Tentakel
5	Halaman Kantor Dinas Pertanian	Labuapi	06 Oktober 2025	Tentakel
6	Taman Kota Gerung	Gerung	12 Oktober 2025	Tentakel
7	Taman Kota Gerung	Gerung	19 Oktober 2025	Tentakel
8	Halaman Kantor Jatisela	Gunung Sari	21 Oktober 2025	Tentakel
9	Ponpes Lentera Hati Ireng Sesela	Gunung Sari	21 Oktober 2025	Tentakel
10	Desa Gontoran	Lingsar	22 Oktober 2025	OPM
11	Desa Bug bug	Lingsar	23 Oktober 2025	OPM
12	Taman Kota Gerung	Gerung	26 Oktober 2025	Tentakel
13	Taman Kota Gerung	Gerung	02 November 2025	Tentakel
14	Halaman Kantor Desa Sembung	Narmada	03 November 2025	Tentakel
15	Halaman Kantor Desa Dasan Tereng	Narmada	04 November 2025	Tentakel
16	Halaman Kantor Desa Pakuan	Narmada	05 November 2025	Tentakel
17	Halaman Kantor Desa Lembah Sempage	Narmada	05 November 2025	Tentakel
18	Halaman Desa Selat	Narmada	06 November 2025	Tentakel
19	Halaman Desa Suranadi	Narmada	07 November 2025	Tentakel

20	Taman Kota Gerung	Gerung	09 November 2025	Tentakel
21	Halaman Kantor Desa Narmada	Narmada	10 November 2025	Tentakel
22	Lapangan Banteng	Lingsar	11 November 2025	Tentakel
23	Halaman Kantor Desa Batu Mekar	Lingsar	12 November 2025	Tentakel
24	Kantor Desa Badrain	Narmada	12 November 2025	GPM
25	Halaman Kantor Desa Peresak	Narmada	13 November 2025	Tentakel
26	Halaman Kantor Desa Rumak	Kediri	14 November 2025	Tentakel
27	Taman Kota Gerung	Gerung	16 November 2025	Tentakel
28	Halaman Kantor Desa Bagik Polak	Labuapi	17 November 2025	Tentakel
29	Halaman Kantor Desa Sandik	Batu Layar	18 November 2025	Tentakel
30	Halaman Kantor Camat Gunung Sari	Gunung Sari	19 November 2025	Tentakel
31	Halaman Lapangan Desa Jembatan Kembar	Lembar	20 November 2025	Tentakel
32	Taman Kota Gerung	Gerung	23 November 2025	Tentakel
33	Halaman Kantor Desa Penimbung	Gunung Sari	26 November 2025	Tentakel
34	Halaman Kantor Desa Kekait	Gunung Sari	27 November 2025	Tentakel
35	Halaman Kantor Desa Jembatan Gantung	Lembar	28 November 2025	Tentakel
36	Taman Kota Gerung	Gerung	30 November 2025	Tentakel
37	Halaman Kantor Desa Kediri	Kediri	02 Desember 2025	Tentakel

38	Halaman Kantor Desa Mesanggok	Gerung	03 Desember 2025	Tentakel
39	Halaman Kantor BPP Gunung Sari	Gunung Sari	04 Desember 2025	Tentakel
40	Taman Kota Gerung	Gerung	07 Desember 2025	Tentakel
41	Lapangan Desa Kuripan	Kuripan	10 Desember 2025	Tentakel
42	Kantor Desa Langko	Lingsar	11 Desember 2025	Tentakel
43	Kantor Desa Gelogor	Kediri	12 Desember 2025	Tentakel
44	Taman Kota Gerung	Gerung	14 Desember 2025	Tentakel
45	Halaman Kantor Desa Karang Bongkot	Kediri	15 Desember 2025	Tentakel
46	Lapangan Gunung Malang	Gerung	16 Desember 2025	Tentakel
47	Kantor Camat Sekotong	Sekotong	17 Desember 2025	Tentakel
48	Kantor Camat Narmada	Narmada	18 Desember 2025	Tentakel
49	Kantor Desa Persiapan Tunjung Are	Batu Layar	19 Desember 2025	Tentakel
50	Taman Kota Gerung	Gerung	21 Desember 2025	Tentakel
51	Kantor Desa Midang	Gunung Sari	22 Desember 2025	Tentakel
52	Kantor Desa Sekotong Timur	Lembar	23 Desember 2025	Tentakel

II.KETERSEDIAAN PASOKAN

MELAKSANAKAN SIDAK PASAR

Dalam rangka menjaga stabilitas harga serta memastikan ketersediaan bahan kebutuhan pokok untuk masyarakat, menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru), Pemerintah Kabupaten Lombok Barat menggelar inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah pasar tradisional di wilayah Lombok Barat. Selain memantau harga, sidak ini juga bertujuan memastikan kelancaran distribusi barang serta mengantisipasi potensi praktik penimbunan yang dapat memicu kelangkaan pasokan. Pemerintah daerah mengimbau para pedagang dan distributor untuk menjaga stabilitas harga serta mematuhi ketentuan yang berlaku agar suasana

menjelang Nataru tetap aman dan kondusif. Sidak yang berjalan lancar ini menasar tiga pasar tradisional, yaitu Pasar Gerung, Pasar Narmada, dan Pasar Gunungsari. Kegiatan tersebut juga mendapat respons positif dari para pedagang yang menyambut baik dialog langsung bersama Wabup UNA. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat menegaskan bahwa pemantauan harga dan ketersediaan kebutuhan pokok akan terus dilakukan secara berkala guna melindungi kesejahteraan masyarakat serta menjaga stabilitas ekonomi daerah menjelang akhir tahun.

JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN SIDAK PASAR

BULAN OKTOBER S/D DESEMBER 2025 DALAM RANGKA HBKN NATARU

NO	TANGGAL SIDAK	LOKASI SIDAK	KECAMATAN	KETERANGAN
1	9 Desember 2025	Pasar Gerung dan Pasar Gunungsari	Lingsar dan Gunung Sari	Sidak Pasar

OPERASI PASAR PENYALURAN BERAS SPHP

Bulog melaksanakan kerjasama dengan pedagang selaku mitra bulog untuk menyalurkan beras SPHP di 4 Pasar kecamatan dan Pasar Gerung menjadi salah satu acuan untuk melaksanakan Operasi Pasar khusus untuk penyaluran beras SPHP dengan melibatkan Pimpinan beserta Kepala OPD yang tergabung dalam Tim TPID Tingkat Kab. Lobar. Pendropan Beras SPHP dilaksanakan 2 kali dalam satu minggu yaitu setiap hari senin dan kamis dengan jumlah 1,5 - 2 ton per satu kali droping untuk tiap mitra bulog.

III.KELANCARAN DISTRIBUSI

1. Pengaturan dan pengawasan kendaraan angkutan barang

Kegiatan ini dilaksanakan setiap hari, mulai dari Oktober s/d Desember 2025, adapun personil yang dilibatkan diganti setiap bulannya. Setiap bulannya, jumlah personil yang dilibatkan sebanyak 9 orang dengan lokus kegiatan pada Tempat Parkir Khusus Segenter. Penertiban ini bertujuan untuk memberikan ruang parkir bagi kendaraan barang yang notabene adalah kendaraan besar agar tidak melakukan parkir di bahu jalan. Adapun kendaraan yang parkir sebagian besar adalah kendaraan yang akan menuju Pelabuhan Lembar maupun pelabuhan Gili Mas dengan tarif yang sangat terjangkau. Ketersediaan ruang parkir ini cukup penting dalam rangka memperlancar arus lalu lintas terlebih pada ruas jalan utama menuju Pelabuhan. Dengan lancarnya arus lalu lintas, maka arus distribusi barang, baik kebutuhan pokok maupun kebutuhan sekunder menjadi lancar juga, tiba tepat waktu dan mengurangi biaya distribusi. Setiap harinya, personil mencatat/mendata kendaraan yang melakukan parkir di Segenter. Adapun jumlah kendaraan angkutan barang yang parkir pada Tempat Parkir Khusus Segenter dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2025 adalah sebanyak 3.323 unit.

2.Pengujian Laik Jalan Kendaraan

Adapun aktifitas yang dilaksanakan antara lain:

- Pelaksanaan uji berkala pada kendaraan angkutan orang dan barang

Pemberian rekomendasi laik jalan bagi kendaraan yang memenuhi syarat keamanan dan keselamatan

- Pengawasan angkutan orang dan barang yang tidak laik jalan

Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor dilaksanakan setiap hari Senin s/d Sabtu di UPT Pengujian Kendaraan Bermotor. Dampak yang ditimbulkan terhadap pengendalian inflasi adalah Memastikan kendaraan angkutan orang dan barang yang beroperasi sudah laik jalan, sehingga resiko kecelakaan lalu lintas yang menghamat distribusi barang dapat dikurangi.

3. Pengawasan lalu lintas dan penertiban areal terminal

Lokasi Pelaksanaan penertiban terminal adalah pada sejumlah terminal di wilayah Kabupaten Lombok Barat, diantaranya :

- Shelter Narmada
- Shelter Gunungsari
- Shelter Keru
- Shelter Kediri

Adapun aktifitas yang dilaksanakan adalah :

- Penertiban areal terminal untuk kelancaran arus keluar masuk kendaraan angkutan penumpang dan barang menuju terminal dan pasar
- Pengawasan kelancaran lalu lintas pada seluruh terminal, terlebih pada hari pasaran maupun menjelang Hari Raya

IV. KOMUNIKASI EFEKTIF

- Penyelenggaraan High Level Meeting dan Rapat Koordinasi TPID Provinsi NTB untuk membahas tantangan dan strategi tindak lanjut pengendalian inflasi serta koordinasi ketersediaan bahan pokok terutama menjelang HBKN Nataru.
- Melakukan rapat koordinasi dan strategi lintas sektoral dalam upaya mengendalikan tekanan inflasi pada sejumlah komoditas pangan strategis.
- Mengikuti kegiatan Capacity Building dan Workshop TPID

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

- Keterbatasan Anggaran bersumber APBD dalam pelaksanaan pengendalian Inflasi, terutama terhadap program subsidi transportasi untuk mendukung kegiatan distribusi dalam pelaksanaan operasi pasar/Gerakan pangan/Pasar tani.
- Masih terdapat kendala dalam pemeliharaan jaringan terhadap pengembangan Web Silakniki (sistem pelaporan harga terkini) untuk memberikan informasi terkait harga dan kegiatan dalam pengendalian inflasi serta melakukan bimtek kepada tenaga operator web silakniki.
- Pentingnya penguatan koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dalam upaya pemenuhan kebutuhan dan menjaga kelancaran distribusi komoditas pangan.
- Kebutuhan akan inovasi dalam mendukung ketersediaan pangan sepanjang tahun dan kelancaran distribusi serta indikasi surplus devisa pangan di masing-masing daerah.
- Penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam pengendalian inflasi daerah untuk tahun anggaran 2025 berupa pemberian subsidi transportasi/fasilitasi distribusi pangan

(FDP) pada saat pelaksanaan kegiatan operasi pasar murah.

- Terkait penyaluran BLT DD pada Triwulan pada triwulan IV bulan oktober sampai Desember sudah tersalur. Untuk itu pihak Dinas PMD tetap melakukan pemantauan dan tetap berupaya agar BLT DD dapat tersalur tepat waktu. Sedangkan untuk program ketahanan pangan sampai dengan bulan Desember pemerintah desa banyak melakukan eksekusi, hal ini disebabkan karena untuk program ketahanan pangan ada kaitannya dengan proses perencanaan dan rembuk kelompok masyarakat.
- Dari hasil evaluasi pelaksanaan pengendalian inflasi pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Barat, ditemukan berbagai permasalahan sebagai berikut :
 1. Belum adanya personil PPNS yang memadai untuk melakukan penindakan/penertiban dalam kegiatan pengawasan kendaraan laik jalan
 2. Masih kurangnya kesadaran masyarakat pemilik kendaraan angkutan / orang untuk melakukan pengujian berkala kendaraan
 3. Belum adanya fasilitas yang memadai di Tempat Parkir Khusus Segenter bagi pengemudi yang melakukan parkir kendaraan
 4. Masih kurangnya fasilitas yang memadai pada lokasi terminal yang bersinggungan dengan pasar
 5. Masih kurangnya ketersediaan angkutan umum pedesaan yang melayani trayek menuju pusat perekonomian

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

- Agar inflasi dapat terjaga berada pada kisaran angka sesuai target Nasional, sehingga dapat menjamin dan memastikan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan terus melakukan pengecekan harga harian di pasar tradisional dan terus melaporkan hasil harga pasar kepada Pemerintah Pusat melalui SP2KP.
- Agar Tim TPID semakin solid melakukan upaya pengendalian inflasi di daerah dengan terus berkoordinasi dengan stakeholder terkait seperti melakukan kegiatan operasi pasar, sidak pasar, Gerakan menanam, serta penggunaan dana BTT dalam pengendalian inflasi di daerah
- Agar pemanfaatan aplikasi digital seperti QRIS dan sejenisnya semakin dikembangkan sehingga dapat membantu Pemasaran produk UMKM melalui Aplikasi dan QR Code E-LAPAK SITEBEL dan QR Code E-LAPAK SITEBEL diharapkan dapat merambah hingga ke Hotel-Hotel yang berada di Lombok Barat.
- Dukungan dan perhatian Pemerintah Pusat terhadap pengendalian inflasi daerah semakin meningkat melalui pengalokasian dana, sarana dan prasarana dalam pengendalian Inflasi.
- Untuk menjaga kestabilan harga di sektor kelautan dan perikanan upaya yang dilakukan antara lain : Bantuan Bibit dan Pakan, Bantuan peralatan penangkapan, Fasilitasi pembangunan Pembuatan pakan mandiri, dan monitoring unit pengolahan ikan. Penerapan teknologi atau alat penyimpanan (cold storage) yang dapat memperpanjang masa penyimpanan produk perikanan sehingga gejolak harga dapat dikendalikan.
- Intervensi pemerintah juga dibutuhkan dalam hal penyediaan anggaran untuk mendukung langkah-langkah pengendalian inflasi seperti operasi pasar murah. Subsidi harga pada saat terjadi kenaikan harga ikan.
- Mengupayakan agar Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Desa dapat tersalurkan tepat waktu agar daya beli masyarakat tetap terjaga.
- Mengupayakan agar Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat Desa (LPMDes) serta program Tanaman Pangan Lestari berjalan sesuai dengan rencana berkoordinasi dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Kelautan dan Perikanan dengan memanfaatkan

Dana Desa yang telah dianggarkan oleh pemerintah desa di 119 desa se kabupaten Lombok Barat sesuai dengan road map.

- Memfasilitasi Masyarakat Desa agar memanfaatkan pekarangan rumah melalui program Pengembangan Desa Wisata Sayur dapat segera terealisasi dengan memanfaatkan dana desa yang telah dianggarkan oleh pemerintah desa yang berkoordinasi dengan dinas instansi terkait seperti Dinas Pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan.
- Tidak meratanya harga sembilan kebutuhan (Sembako) ditengah-tengah masyarakat desa, karena dipengaruhi oleh faktor letak geografis desa masing-masing. Berdasarkan latar belakang tersebut Maka DPMD Kabupaten Lombok Barat selaku OPD yang langsung dan secara intens berhubungan melakukan pembinaan dan pengawasan dengan Desa Desa Se Kab. Lobar, kembali melakukan langkah-langkah yang strategis dengan semua OPD dan Instansi Vertikal yang melakukan pelayanan melalui : “ Pemda Menyapa Desa tahun 2025 “
- Rekomendasi kebijakan pada Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Barat :
 1. Meningkatkan efisiensi produksi pertanian dengan memperbaiki infrastruktur pertanian, meningkatkan akses ke teknologi pertanian yang modern, dan memberikan pelatihan yang berkualitas kepada
 2. Meningkatkan produktivitas pertanian dengan menggalakkan penggunaan pupuk dan pestisida yang ramah lingkungan, serta mengoptimalkan pengelolaan air dan lahan pertanian.
 3. Mendorong diversifikasi usaha pertanian dengan memberikan pelatihan kepada petani untuk mengembangkan komoditas pertanian yang beragam, sehingga dapat mengurangi ketergantungan pada satu komoditas saja.
 4. Memperkuat pasar pertanian dengan meningkatkan akses petani ke pasar yang lebih luas, memperbaiki infrastruktur pasaran, serta mengimplementasikan regulasi yang memungkinkan terciptanya pasar yang sehat dan berdaya saing.
 5. kualitas dan kuantitas stok pangan dengan mengoptimalkan regulasi impor dan ekspor, serta mendorong keberlangsungan kegiatan riset dan pengembangan pertanian.
 6. Penting adanya subsidi harga produk yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat disaat harga melonjak tinggi disamping adanya subsidi Fasilitas Transportasi Pangan (FDP) saat pelaksanaan kegiatan pasar Tani/ Tenten Tani Keliling (TENTAKEL) .
 7. Pembentukan koperasi pertanian, untuk membantu petani dalam memperoleh harga yang adil dan mengurangi biaya produksi.
- Rekomendasi kebijakan pada pada DPMD Kab. Lombok Barat

Beberapa upaya yang perlu dilakukan untuk menekan laju inflasi terutama di desa antara lain :

1. Mengupayakan agar Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Desa dapat tersalurkan tepat waktu agar daya beli masyarakat tetap terjaga.
 2. Mengupayakan Ketahanan Pangan dengan memanfaatkan Dana Desa yang telah dianggarkan oleh pemerintah desa di 119 desa se kabupaten Lombok Barat, yang berkoordinasi dengan dinas instansi terkait seperti Dinas Pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan.
- Rekomendasi kebijakan pada pada Dinas perhubungan Kab. Lombok Barat :
1. **Perbaikan Fasilitas Pendukung di setiap tempat parkir, terminal dan Pelabuhan Pengumpan**

Ketersediaan terminal maupun pelabuhan cukup penting dalam kelancaran transportasi. Untuk itu fasilitas pendukung terus ditingkatkan pada terminal di Kabupaten Lombok Barat, khususnya tempat parkir khusus angkutan barang. Pendistribusian komoditas yang efisien akan menurunkan harga jual dan dapat menekan angka inflasi. Selain didukung dengan fasilitas pendukung, hal yang tidak kalah pentingnya adalah pengawasan yang lebih intensif oleh personil Dinas Perhubungan yang dilakukan di sejumlah terminal, baik pengawasan dalam penertiban parkir kendaraan maupun kegiatan bongkar muat.

2. Evaluasi jumlah jaringan trayek menuju pusat perekonomian.

Hingga saat ini, jumlah jaringan trayek di Kabupaten Lombok Barat adalah 31 jaringan. Dalam hal jaringan trayek yang menghubungkan pusat perekonomian, dari keseluruhan jaringan tersebut, hanya 75% jaringan yang tergolong aktif, 25% diantaranya masih non aktif. Artinya belum ada angkutan/moda transportasi yang beroperasi dalam trayek tersebut. Kebijakan ke depannya adalah mengaktifkan kembali koperasi angkutan khususnya pada jaringan non aktif, sehingga jumlah angkutan pedesaan mencukupi kebutuhan masyarakat dari dan menuju pusat perekonomian. Hal ini mendukung pemerintah secara tidak langsung dalam mengoptimalkan distribusi komoditas pangan utama kepada masyarakat sehingga dapat menekan angka inflasi.

3. Penyediaan prasarana dan perlengkapan jalan di sepanjang jalur strategis menuju pusat perekonomian.

Kondisi jalan yang mantap dan perlengkapan jalan yang berkeselamatan memberikan dampak tidak langsung berupa kenyamanan bagi pengguna jalan khususnya pengemudi angkutan kendaraan barang maupun pelaku ekonomi lainnya yang berkegiatan di pasar. Mengurangi dampak kecelakaan lalu lintas sehingga distribusi berbagai komoditi utama pangan juga lancar.